

Dari Keberagaman Entitas Menjadi Ketimpangan Multisektor di Indonesia

Muhammad Robith Farkhan^{1*}, Enok Maryani¹

¹Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received October 25, 2023

Revised December 20, 2023

Accepted December 24, 2023

Available online December 31, 2023

Kata Kunci:

Keberagaman; Entitas; Ketimpangan Multisektor

Keywords:

Diversity; Entity; Multisectors Inequality



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license. Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan dari potensi pluralitas entitas menjadi permasalahan ketimpangan multisektor di Indonesia melalui kajian literatur. Indonesia memiliki keanekaragaman entitas dari sumberdaya alam hingga sumberdaya manusia yang meliputi pendidikan, ekonomi, sosial, politik, hingga budaya. Keragaman entitas tersebut menjadi sebuah potensi yang menguntungkan Indonesia sebagai kelebihan di negara di Asia Tenggara bahkan di dunia yang memiliki keragaman entitas, bahkan Indonesia disebut sebagai "titik pusat dunia". Potensi tersebut juga dapat menjadi sebuah permasalahan yang memecahbelah persatuan dan kesatuan Indonesia yang telah dibangun sejak masa pendudukan pada puluhan hingga belasan dekade yang lalu. Penelitian ini menggunakan literature review pada sejumlah beberapa artikel ilmiah terakreditasi yang sesuai dengan penelitian meliputi ketimpangan sosial, ketimpangan ekonomi, ketimpangan budaya, ketimpangan pendidikan, dan ketimpangan politik. Hasil integrasi literatur tersebut akan membentuk sebuah rangkaian kajian ketimpangan multisektor di Indonesia sebagai dampak dari malfungsi koordinasi adanya keanekaragaman pada setiap entitas.

ABSTRACT

This research analyzes the change from the potential plurality of entities to the problem of multi-sector inequality in Indonesia through a literature review. Indonesia has a diversity of entities, from natural resources to human resources, which include education, economics, social, political, and cultural. This diversity of entities has the potential to benefit Indonesia as an advantage in countries in Southeast Asia and even in the world with diverse entities; Indonesia is even called the "central point of the world." This potential could also become a problem that divides Indonesia's unity and integrity, which has been built since the occupation period tens to dozens of decades ago. This research uses a literature review of several accredited scientific articles relevant to the research, including social, economic, cultural, educational, and political inequality. The results of integrating this literature will form a series of studies on multi-sector inequality in Indonesia due to coordination malfunctions due to the diversity of each entity.

1. PENDAHULUAN

Indonesia memiliki keanekaragaman di setiap bidang dari melimpahnya sumberdaya alam sampai pada multidimensi sumberdaya manusia (Nurman, Yusriadi, & Hamim, 2022). Indonesia disebut banyak julukan disebabkan ragamnya multi sektor. Pengistilahan tersebut berdampak pada tingginya minat kajian penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia terkait keberagaman. Keanekaragaman di Indonesia menjadi potensi dan kelebihan di kancah regional Asia Tenggara dan dunia secara luas (Lestari, 2015). Sumberdaya alam yang melimpah di setiap wilayah dan setiap pulau sehingga dimanfaatkan untuk dilakukan eksplorasi dari sektor migas, perak, emas, tembaga, platinum, sektor tambang lain, serta non tambang (Jayadi, Abduh, & Basri, 2022). Hal tersebut dilakukan oleh sumberdaya manusia yang berasal dari Indonesia yang kreatif dan berkuantitas tinggi. Sumberdaya manusia Indonesia memiliki jumlah yang sangat banyak, secara langsung berdampak pada keanekaragaman yang dibentuknya seperti sosial, ekonomi, politik, dan budaya, serta hasil turunan dari beberapa sektor tersebut. Adanya keragaman tersebut juga dapat berpotensi menjadi suatu permasalahan yang dapat mengancam Indonesia.

*Corresponding author

E-mail addresses: muhammadrobithgeo@gmail.com

Permasalahan dari keberagaman sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang tidak terkontrol dan tidak terawasi dengan baik yakni terjadinya ketimpangan yang dapat berpotensi menjadi konflik (Abdulkarim, et al., 2020). Ketimpangan sebagai bentuk kondisi yang tidak sempurna karena adanya suatu perbedaan. Ketimpangan ruang adalah hal yang bersifat umum dari beberapa ketimpangan khusus (Nirajan, 2020). Kajian terkait ketimpangan ruang memiliki lingkup yang sangat luas dan terlalu umum (*general*), sehingga perlu dilakukan spesifikasi pada setiap aspek ketimpangan ruang agar lebih rinci. Ketimpangan ruang terjadi disebabkan adanya perbedaan yang sangat signifikan (timpang) pada dua atau lebih entitas, sehingga ada sisi yang maju atau memiliki kondisi yang baik, sedangkan pada bagian lain tidak maju atau memiliki kondisi yang tidak baik. Contoh spesifik pada ketimpangan pendidikan, salah satunya berkaitan dengan infrastruktur sekolah yang berada di lokasi jauh dari perkotaan dengan kondisi geografis berupa pegunungan umumnya memiliki fasilitas yang cukup berbeda dengan infrastruktur sekolah yang berada di wilayah perkotaan.

Ketimpangan ruang sebagai akumulasi dari berbagai ketimpangan yang ada didalam kehidupan manusia, diantaranya ketimpangan fisik dan ketimpangan non-fisik. Ketimpangan fisik berkaitan dengan ketimpangan yang terjadi pada lingkungan yakni ketimpangan ekologi, ketimpangan lingkungan, ketimpangan biosfer, dan ketimpangan lainnya. Ketimpangan non-fisik berkaitan dengan kesenjangan yang terjadi di kehidupan manusia, diantaranya ketimpangan sosial, ketimpangan ekonomi, ketimpangan budaya, ketimpangan politik, dan ketimpangan pendidikan. Ketimpangan yang terjadi pada keberagaman entitas pada penelitian ini berkaitan dengan ketimpangan non-fisik. Ketimpangan fisik dan non-fisik membentuk ketimpangan multidimensional atau multisektoral.

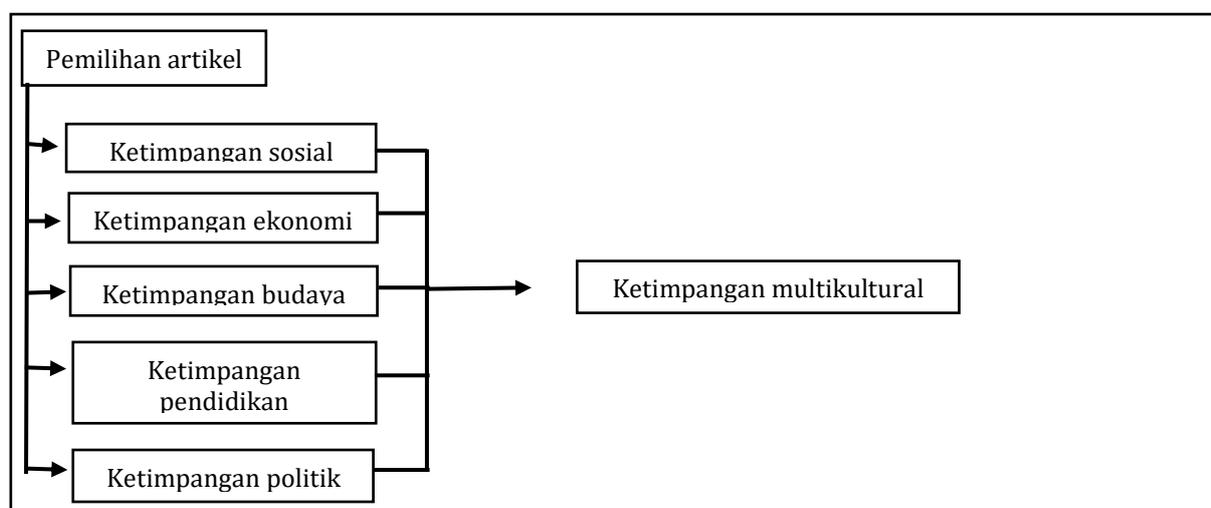
Ketimpangan multidimensional (*multidimensional inequality*) telah dilakukan penelitian dan pengkajian dengan kegiatan investigasi perkembangan ketimpangan multidimensional di negara Vietnam, dengan rentang waktu 10 tahun yakni sejak tahun 2002 hingga tahun 2012 (Bui & Erreygers, 2020). Penelitian tersebut mengklasifikasikan kedalam tiga dimensi, dimensi pertama tidak mengintegrasikan antar ketimpangan, dimensi kedua mengintegrasikan antar ketimpangan, dan dimensi ketiga mengintegrasikan tiga jenis ketimpangan. Ketimpangan dimensi pertama diantaranya *consumption, education, housing, dan health*. Ketimpangan kedua diantaranya, *consumption-health, consumption-housing, consumption-education, health-housing, housing-education, dan health-education*. Ketimpangan ketiga mengintegrasikan tiga ketimpangan diantaranya *consumption-health-housing, consumption-health-education, consumption-housing-education, dan health-housing-education*. Ketiga dimensi ketimpangan tersebut dipaparkan data melalui deskriptif statistik dan statistika inferensial.

Ketimpangan multidimensional atau ketimpangan multisektor di Vietnam akan berbeda dengan ketimpangan multidimensi di negara lain termasuk negara Indonesia. Meskipun kedua negara tersebut memiliki kesamaan pada kategorisasi negara berkembang, perkembangan dan hambatan berbeda pada beberapa aspek. Penelitian yang telah dipaparkan diparagraf sebelum ini mengkategorikan ketimpangan multidimensi di Vietnam kedalam beberapa ketimpangan, diantaranya pendidikan, bahan pokok, tempat tinggal, dan kesehatan. Kajian ketimpangan tersebut peneliti jadikan sebagai rujukan generalisasi ketimpangan multisektor di Indonesia. Penelitian pada ketimpangan multidimensi di Vietnam dinilai masih terdapat gap riset jika akan dilakukan kajian di Indonesia. Beberapa gap tersebut akan dijawab melalui penelitian. Adapun yang berbeda dengan penelitian relevan sebelumnya, yakni penelitian ini menambahkan kajian ketimpangan budaya dan ketimpangan politik. Multi entitas budaya dan multientitas politik di Indonesia berpotensi memunculkan *clash of civilization* yang disebabkan *clash of culture* dan *clash of politic*, sehingga kedua ketimpangan tersebut yang dinilai cukup potensial terjadi di Indonesia.

Adapun kebaruan pada penelitian ini adalah pengkajian terkait multientitas di Indonesia yang dapat berpotensi memunculkan permasalahan yakni ketimpangan multisektor yang berbeda dengan negara lain, sehingga memunculkan urgensi penelitian. Pentingnya kajian ini dipublikasi adalah untuk memberikan pengetahuan bagi khalayak umum bahwa perlunya melakukan generalisasi dari setiap kajian yang spesifik agar dapat diketahui sektor mana saja yang terjadi ketimpangan di Indonesia. Hal tersebut agar memudahkan setiap pemangku kepentingan dalam mengamati dan memperbaiki setiap ketimpangan. Selain hal tersebut, melalui penelitian ini akan dapat diketahui beberapa potensi yang ada, kemudian selanjutnya dioptimalkan untuk menunjang kekuatan Indonesia. Jumlah publikasi terkait ketimpangan di Indonesia juga dapat diketahui melalui konten yang tersurat didalam kajian ini, sehingga peneliti berikutnya dapat mengamati gap atau celah yang dapat dijadikan sebagai penelitian terkait ketimpangan-ketimpangan di Indonesia. Tujuan utamanya kajian ini adalah sebagai bagian kecil dari kontribusi dalam memperkaya sumber-sumber pengetahuan tambahan terkait dengan kajian ketimpangan ruang secara umum di Indonesia.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode *literature review*, pendekatan *semi-systematic literature review*. beberapa sumber relevan yang digunakan berupa jurnal ilmiah, prosiding ilmiah, sedangkan buku dan lainnya sebagai sumber penunjang. *Literature review* merupakan metodologi penelitian yang melibatkan berbagai kajian literatur yang berupa penelitian dan pengkajian keilmuan yang beragam, sehingga dapat diambil garis besar dari setiap penelitian relevan untuk menguatkan penelitian yang dilakukan (Snyder, 2019). Adapun pemilihan artikel jurnal pada *semi-sistematic* melalui penelaahan tema terkait ketimpangan sosial, ketimpangan ekonomi, ketimpangan budaya, ketimpangan politik, dan ketimpangan pendidikan. Berbagai ketimpangan tersebut dilakukan pencarian melalui google scholar, sinta, scimago, elsevier, dan mesin pencari lainnya. Setiap ketimpangan tersebut digeneralisasikan dan disimpulkan menjadi penelitian mengenai ketimpangan multisektor di Indonesia. Peneliti tidak menggunakan platform apapun seperti *Publish or Perish* dan lainnya, hanya menggunakan cara konvensional dengan mencari artikel ilmiah yang relevan melalui mesin pencari. Peneliti membatasi artikel ilmiah terbitan 10 tahun terakhir, kualitas artikel ilmiah minimal pada jurnal nasional tingkatan sinta 3, dan kuantitas artikel ilmiah berjumlah 29 artikel.



Gambar 1. Kriteria Pemilihan Artikel

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Keragaman, Ketimpangan dan Konflik

An & Lee (2022); Servaes, Choudhury, & Parikh (2022) meneliti dengan sebuah pertanyaan “*what is diversity*” yang menghasilkan sebuah pengertian atau definisi dari keragaman (*diversity*). Keragaman memiliki makna perbedaan latar belakang karakteristik suatu hal yang membentuk berbagai perbedaan-perbedaan sesuai dengan konteksnya. Suatu keragaman (*diversity*) memiliki kelebihan atau dampak positif yang dicontohkan pada keragaman penduduk di Amerika Serikat terkait gender, etnik, identitas, kemampuan, tingkat pendidikan, dan lainnya. Penelitian ini juga menunjukkan adanya sebuah keberagaman sebagai keunikan dan kekuatan yang besar pada suatu hal, dicontohkan dalam penelitian terkait keragaman pada angkatan kerja yang menciptakan berbagai kekuatan untuk menciptakan kualitas tenaga kerja. Hal tersebut menunjukkan keberagaman sebagai suatu hal yang penting adanya, tidak hanya suatu yang ada pada fakta lapangan (Liu, Zhu, & Wang, 2023; Ramos, Hewstone, Barreto, & Branscombe, 2016), selain keragaman dapat menghasilkan dampak positif, ketimpangan juga dapat menjadi dampak negatif dari adanya sebuah keragaman (*diversity*). Keberagaman dan ketimpangan diteliti melalui penelitian yang menghasilkan persepsi keragaman (*diversity*) tenaga kerja berhubungan positif terhadap konflik antar pribadi (dampak negatif). Adanya ketimpangan yang berlanjutan dapat menimbulkan konflik, semisal ketimpangan sosial yang dapat menyebabkan konflik sosial. Penelitian sejenis juga memaparkan bahwa adanya keberagaman (*diversity*) sebagai sebuah tantangan (*challenge*), konsekuensi negatif dari adanya keragaman.

Leeuwen & Foldvari (2016) berfokus pada menelaah berbagai ketimpangan di Indonesia yang terjadi pada rentang tahun 1932 sampai tahun 2008. Adapun temuan penelitian tersebut yakni peningkatan ketimpangan di Indonesia mulai terjadi pada tahun 1932-2008, khususnya terjadi pada awal periode tersebut, yang disebabkan oleh peralihan revolusi pertanian dari pertanian domestik menuju pertanian

ekspor. Adanya revolusi tersebut menyebabkan peningkatan kesenjangan pada kawasan perdesaan dan perkotaan, yang kemudian meningkatkan ketimpangan pada keseluruhan bagian di Indonesia. Tahun 1960 dan setelahnya, ketimpangan yang terjadi mengalami penurunan tajam, yang disebabkan oleh adanya jasa dan manufaktur yang meningkatkan produktivitas tenaga kerja di bagian pertanian.

Arbatli, Ashraf, Galor, & Klemp (2020) melakukan pengkajian terkait dengan adanya sebuah keberagaman yang dapat menciptakan konflik. Penelitian tersebut menggambarkan pada keanekaragaman penduduk di suatu wilayah setingkat sub-nasional (daerah) atau nasional dapat memicu terjadinya konflik lingkup antar-kelompok dan konflik pada lingkup intra-kelompok melalui berbagai mekanisme yang terjadi. Dipaparkan mengapa dapat terjadi hal tersebut, pertama yakni keragaman penduduk yang berlebihan dapat berdampak kurang baik pada prevalensi rasa saling percaya sehingga perlunya diciptakan kondisi yang ideal pada penduduk, kedua yakni keberagaman penduduk menggambarkan perbedaan antar-individu pada suatu hal yang mendasar, ketiga yakni keberagaman penduduk mencerminkan keberagaman antar-individu pada karakteristik yang melekat. Penelitian ini telah menunjukkan bahwa adanya suatu keberagaman (*diversity*) dapat menimbulkan konflik, konflik tersebut muncul dari adanya ketimpangan. Berdasarkan pada berbagai penelitian untuk memecahkan relevansi antara keanekaragaman, ketimpangan, dan konflik melalui berbagai sudut pandang yang berbeda. Sebuah keanekaragaman terdapat banyak individu yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga membentuk klaster tertentu (Servaes, Choudhury, & Parikh, 2022). Setiap keberagaman klaster yang mewakili beberapa individu menjadi ciri adanya keanekaragaman entitas. Keberagaman sebagai ranah yang sangat sensitif terhadap perbedaan signifikan antar entitas yang menjadi suatu ketimpangan atau kesenjangan. Ketimpangan dan konflik berpotensi terjadi pada berbagai bentuk masyarakat, khususnya pada masyarakat yang kompleks seperti pada masyarakat Indonesia. Perpecahan tidak selalu disebabkan oleh konflik sosial, tetapi dapat berdampak pada perkembangan sosial dan perubahan sosial masyarakat (Zuldin, 2019).

Ketimpangan Sosial

Hernovianty, Pratiwi, & Adventia (2021) mengkaji ketimpangan sosial di lingkup sub-nasional atau lingkup daerah Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat. Ketimpangan sosial dikaji dengan analisis sebab-akibat, sehingga didapatkan hasil yang analitis dan terstruktur. Pengukuran tingkat ketimpangan sosial dilakukan melalui analisis skor, dengan mempertimbangkan berbagai indikator diantaranya indikator pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk, tingkat pendidikan masyarakat, kesehatan masyarakat, dan tenaga kerja. Adapun temuan penelitian didapatkan bahwa kategori ketimpangan yang tinggi terjadi di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan barat. Pertumbuhan penduduk yang digambarkan melalui persentase setingkat kabupaten lebih tinggi dari pertumbuhan penduduk tingkat kecamatan. Pertumbuhan penduduk sebagai faktor terjadinya ketimpangan sosial di Kabupaten Sekadau, sedangkan faktor lainnya yang juga dapat mempengaruhi ketimpangan sosial yakni kepadatan penduduk. Rasio kepadatan penduduk pada tingkatan kecamatan dinilai lebih rendah dibandingkan kepadatan penduduk pada tingkat kabupaten. Faktor dominan dalam menciptakan ketimpangan yakni tenaga kerja. Jumlah penduduk usia kerja yang tinggi tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang berkerja pada setiap kecamatan. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa ketimpangan sosial terjadi pada perbedaan yang signifikan terkait rasio pertumbuhan penduduk, rasio kepadatan penduduk, rasio tenaga kerja, dan rasio kependudukan lainnya. Perbedaan tersebut dihasilkan dari adanya keberagaman (*diversity*) sosial masyarakat Indonesia.

Attamimi, Kinseng, & Agusta (2018) telah mengkaji ketimpangan sosial juga dapat berfokus dan spesifik pada bentukan kelas masyarakat dan ketimpangan struktural masyarakat. Penelitian tersebut melakukan penelitian terkait terbentuknya kelas sosial pada masyarakat nelayan, yang menyebabkan ketimpangan struktural di lingkungan kehidupan pemukiman nelayan. Adanya ketimpangan struktural yakni ketidakseimbangan pendapatan (*income*) masyarakat yang terjadi antar kelas sosial. Pendapatan masyarakat nelayan salah satunya dapat diketahui melalui kepemilikan alat produksi. Adapun temuan penelitian yakni, ketimpangan struktural masyarakat nelayan digambarkan dengan adanya kelas sosial, lima kelas sosial pada masyarakat nelayan diantaranya buruh nelayan (*masnait*), buruh nelayan (*tanase*), nelayan lingkup kecil, nelayan lingkup sedang, dan nelayan lingkup besar (*pemilik atau kapitalis*). Kelas sosial dapat membatasi kemajuan masyarakat nelayan, dan berpengaruh terhadap terciptanya ketimpangan sosial. Penelitian tersebut juga memaparkan dampak negatif ketimpangan sosial, perbedaan yang signifikan pada nelayan kaya dan buruh nelayan dari hasil tangkapan, pendapatan, alat produksi (*tangkap*), dan bagi hasil yang signifikan. Ketimpangan sosial masyarakat nelayan dipecahkan melalui penguatan visi Indonesia sebagai negara maritim yang didasarkan pada sila kelima yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Camarero & Olivia (2019) mengkaji terkait dengan ketimpangan sosial pada gap masalah di kawasan perdesaan. Kajian diawali dengan paparan dampak yang ditimbulkan dari krisis global sosial dan ekonomi yang melanda dunia, khususnya Eropa bagian selatan. Adapun permasalahan

yang relevan juga dialami oleh Indonesia yakni konsentrasi territorial, kesenjangan perdesaan, keterpencilan desa, dan aksesibilitas. Konsentrasi territorial berkaitan dengan pemusatan penduduk di wilayah kota, sedangkan desa akan selalu diidentikan sebagai wilayah yang sedikit penduduknya. Kesenjangan kawasan perdesaan yakni rasio harapan hidup dan kondisi kehidupan masyarakat yang sangat signifikan berbeda dengan wilayah perkotaan. Kondisi desa yang memiliki berbagai keterbatasan aksesibilitas dan desa yang memiliki lokasi yang terpencil. Kondisi desa tersebut mengharuskan masyarakat untuk melakukan mobilitas fisik dan mobilitas sosial, untuk memenuhi kebutuhan yang belum tersedia di desa. Mobilitas pada penelitian tersebut sebagai sebuah isu utama yang ditujukan untuk mengurangi permasalahan ketimpangan sosio-teritorial. Kesejahteraan dan keberlanjutan sosial masyarakat kawasan perdesaan berkaitan erat dengan aksesibilitas dan kegiatan mobilitas. Temuan penelitian terkait empat permasalahan kesenjangan sosial masyarakat kawasan perdesaan, yakni ketidakseimbangan demografi, pra-sejahtera kawasan perdesaan, ketidakseimbangan antar generasi, dan kesenjangan aksesibilitas dan mobilitas. Penelitian tersebut ditutup melalui kesimpulan terkait perlunya pencapaian tujuan sosial melalui kebijakan tata kelola kawasan perdesaan yang berkelanjutan.

Meskipun penelitian Elenbaas, Rizzo, & Killen (2022) dilakukan di Amerika Serikat, tetapi beberapa hal dapat merepresentasikan kondisi yang juga terjadi di Indonesia. Kesetaraan kesempatan sangat diperhatikan oleh seluruh pihak, tetapi justru mengabaikan faktor penyebab ketimpangan sosial. Adapun berbagai faktor penyebab ketimpangan sosial tersebut, diantaranya pengucilan secara sistematis seperti pada pekerjaan dan pendidikan, yang didasarkan pada karakteristik yang dimiliki suatu kelompok seperti suku, ras, gender, dan status sosial-ekonomi. Hal tersebut menyebabkan terus menerus terjadinya kesenjangan sosial. Adapun temuan penelitian tersebut didapatkan fakta bahwa masa kanak-kanak memiliki kesadaran pada kesenjangan sosial, ini awal dimiliki manusia. Masa tersebut manusia mengamati dan mengalami penyebab kesenjangan sosial, sehingga memiliki kapasitas awal dalam melakukan pemecahan masalah melalui teman sepermainan. Melalui pelibatan kerangka berpikir yang kompleks terkait dengan pemikiran perkembangan sosial, dapat disintesis terkait segenap sumberdaya anak-anak dan remaja dalam mengkonsep ketimpangan sosial, dan peran positif dari ilmu pengetahuan dalam upaya pemecahan ketimpangan sosial yang terus terjadi ditengah masyarakat diseluruh dunia.

Ketimpangan Ekonomi

Itskovich & Factor (2023) melakukan pengkajian terkait kesenjangan ekonomi dan kejahatan sebagai sebab-akibat. Adapun temuan penelitian yakni pengaruh munculnya kejahatan disebabkan oleh adanya kesenjangan ekonomi, keduanya memiliki korelasi yang positif, artinya kedua hal tersebut menunjukkan adanya sebuah pengaruh yang benar atau nyata adanya. Kerangka resistensi sosial menunjukkan adanya bukti deskripsi yang valid terkait korelasi positif. Temuan lainnya yakni adanya perilaku kejahatan atau tindakan kriminal berasal dari terjadinya kesenjangan ekonomi yang dapat menjadikan individu terasingkan dari nilai-nilai didalam masyarakat, individu tersebut menolak setiap nilai didalam masyarakat, sehingga tindakannya bersinggungan dari nilai-nilai mayoritas masyarakat. Penelitian relevan lainnya lebih khusus (specific) mengkaji mengenai adanya hubungan antara tingkat kejahatan dengan ketimpangan pendapatan (Sugiharti, Purwono, Esquivias, & Rohmawati, 2023). Adanya pengaruh keduanya tersebut lebih menguatkan bahwa kesenjangan ekonomi berkorelasi dengan terciptanya kejahatan. Penelitian tersebut lebih menambahkan data jumlah kejahatan (*crime rates and proverty rates*) tahun 2019 ditemuka fakta bahwa wilayah Provinsi Papua Barat menempati posisi tertinggi dari angka kejahatan sekitar empat tahun lalu. Adapun kejahatan yang muncul dari adanya kesenjangan sosial di Indonesia, diantaranya pencurian, perampokan, tawuran warga, tawuran pelajar, kekerasan, dan kejahatan jenis lain yang mengancam keselamatan individu dan kelompok masyarakat.

Mdingi & Ho (2021) melakukan pengkajian lebih spesifik dari ketimpangan ekonomi namun masih relevan dengan hal tersebut, terkait dengan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan pendapatan. Adapun temuan penelitian pada literatur review penelitian melakukan identifikasi berbagai indikator yang mengkoneksi pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan pendapatan, yang meliputi tingkat perkembangan ekonomi, tingkat perkembangan teknologi, kondisi sosial-politik, tingkat tabungan yang dimiliki masyarakat, kondisi ekonomi-politik, kondisi pasar, dan kondisi kelembagaan. Koneksi antara ketimpangan pendapatan dengan pertumbuhan ekonomi dapat bersifat hubungan yang positif, negatif, tidak meyakinkan, dan tidak ada hubungan. Indikator tingkat tabungan yang dimiliki masyarakat memiliki nilai yang positif, artinya hal tersebut ada hubungannya antara ketimpangan pendapatan masyarakat dengan pertumbuhan ekonomi. Maurilla, Suriani, & Nasir (2022) menemukan bahwa adanya ketimpangan pendapatan sebagai salah satu faktor penghambat pembangunan dan perkembangan ekonomi disuatu negara. Rasio Gini atau Koefisien Gini ditetapkan sebagai indikator pengukuran kesenjangan pendapatan secara umum berlaku diseluruh dunia. Koefisien gini Indonesia selama satu decade terakhir selalu rendah, meskipun salah satu wilayah yakni Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta didapatkan rasio gini yang diatas

rata-rata nasional. Data dikumpulkan dari sejumlah lima wilayah kabupaten dan kota pada tahun 2010 sampai 2021. Didapatkan hasil bahwa tidak adanya korelasi sebab-akibat antara ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, maknanya keduanya tidak ada hubungan yakni antara ketimpangan pendapatan dengan pertumbuhan ekonomi. Tetapi berdasarkan pada kajian teoretis mengenai model ketimpangan pendapatan, pendidikan, dan upah minimum regional memiliki dampak yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Penelitian tersebut memberikan kontribusi pada pemerintah daerah agar berfokus pada bidang pendidikan, pemerataan upah minimum regional, dan pertumbuhan ekonomi wilayah untuk mengurangi ketimpangan pendapatan di wilayah Indonesia, khususnya pada kasus tersebut di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sulistyaningrum & Tjahjadi (2022) menjelaskan permasalahan medasar yang terjadi di Indonesia yakni adanya ketimpangan ekonomi. Ketimpangan di Indonesia dapat berpotensi menyebabkan sumberdaya yang tidak optimal dalam melakukan distribusinya, ketidakstabilan ekonomi, yang dapat menyebabkan krisis ekonomi seperti yang terjadi pada sekitar tahun 1997-1999 di Indonesia. Hal yang lebih spesifik pada ketimpangan pendapatan ditemukan bahwa aspek gender pada pekerja perempuan semua kelas lebih rendah pendapatannya dibandingkan dengan laki-laki kelas bawah, yang justru memiliki pendapatan yang lebih besar. Ketimpangan antara kelompok memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap adanya ketimpangan di Indonesia. Adapun pada sisi yang lain, adanya ketimpangan pada suatu kelompok sebagai pemicu potensi terjadinya konflik horizontal pada kelompok. Beberapa hal tersebut pada penelitian ini memberikan masukan atau saran kepada pemerintah agar berfokus memperhatikan setiap ketimpangan secara luas dan secara sempit untuk mengantisipasi hal yang menimbulkan dampak yang negatif didalam kehidupan masyarakat Indonesia secara umum. Hill (2021) mengemukakan Indonesia telah mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup cepat pada beberapa dekade masa lalu, sekitar limapuluh tahun yang lalu, khususnya rentang tahun 1999-2001 pasca resesi terburuk Indonesia hingga saat ini. Penelitian tersebut dinyatakan didalam pertanyaan yakni apakah pertumbuhan ekonomi dapat berdampak pada peningkatan standar hidup? Ini akan dikaji lebih rinci pada bagian ini. Temuan penelitian didapatkan bahwa secara filosofis terkait standar hidup masih pada tahap pendugaan, dan indikator sosial tidak seluruhnya bersifat hal yang sama. Fokus kajian pada indikator yang lebih terukur yakni kesejahteraan manusia, lebih spesifik pada kemiskinan dan kesenjangan. Ada dua periode yang dominan dalam tren perubahan dan pertumbuhan pengentasan kemiskinan, diantaranya pada satu dekade sejak pertengahan tahun 1970 dilakukan percepatan perkembangan sektor tanaman pangan, dan keberhasilan dalam peralihan masa pertanian konvensional menjadi industrialisasi pertanian yang padat karya dan berorientasi pada pasar internasional melalui kegiatan ekspor semenjak tahun 1980 an. Penelitian ini juga memperhatikan terkait data penunjang indikator kemajuan perekonomian, diantaranya indeks pembangunan manusia (IPM) dan kebijakan pemerintah pada masa lampau. Indonesia memiliki keragaman perekonomian di dunia yang dapat terjadi ketimpangan yang sifatnya regional.

Ketimpangan Budaya

Supraptiningsih, Jubba, Hariyanto, & Rahmawati (2023) melakukan penyelidikan pada sebuah tantangan yang dihadapi oleh Perempuan di Pulau Madura Provinsi Jawa Timur, dalam sebuah upaya untuk mendapatkan hak milik pada kepemilikan tanah. Hal ini disebabkan hak kepemilikan tanah pada sebagian besar telah diwariskan pada keturunan laki-laki. Adapun temuan didalam penelitian tersebut yakni perlakuan yang tidak adil pada Perempuan didalam keluarga yang berlaku di Pulau Madura, ini sebuah tantangan yang berakar pada konstruksi budaya. Hambatan perempuan pada budaya patriarki di Pulau Madura, sehingga sulit dalam kontribusi pada urusan pemerintahan. Diskriminasi gender pada perempuan di Pulau Madura terutama pada perolehan hak milik telah membatasi masa depan perempuan, sehingga akan sangat bergantung pada laki-laki. Keterbatasan pada kebebasan perempuan masyarakat Madura dibentuk dari perlakuan budaya konstruksi. Hal tersebut sebagai sebuah ketimpangan budaya yang telah berlangsung semenjak ratusan dan ribuan tahun yang lalu melalui keturunan dan antar generasi pada Suku Madura di Indonesia, tetapi sisi lain yang positif yakni hal ini sebagai suatu keunikan salah satu suku di Indonesia yang dapat dikaji sebagai kekayaan dan keberagaman kebudayaan (*multicultural*).

Ali & Byrne (2023) mengkaji mengenai permasalahan keberagaman yang termasuk didalamnya sektor budaya dan ketimpangan etnis. Suatu keberagaman sebagai hal yang diharapkan oleh Industri Kreatif dan Budaya (*the Creative and Cultural Industries/CCI*). Industri tersebut memperkerjakan berbagai etnis untuk melayani audiens yang beragam pada sosio-ekonomi, ini menciptakan suatu kekhawatiran. Adapun temuan didalam artikel tersebut yakni secara empiris melakukan pengkajian terkait kebijakan kesetaraan, keberagaman, dan inklusi sebagai salah satu praktik keberagaman yang lebih mengakar dan lebih tampak, sehingga dapat segera dilakukan perbaikan yang lebih cepat pada organisasi kebudayaan. Pada budaya di Indonesia yang beragam, tentu tingkat toleransi cukup tinggi, sehingga isu seperti SARA (suku, agama, ras, dan antar-golongan) cukup menjadi hal yang sensitive, sehingga pemerintahan melalui

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memberikan ruang yang luas untuk kebudayaan. Penelitian yang dilakukan Ali dan Byrne melakukan upaya mengatasi setiap hambatan institusional dan sosio-kultural agar dapat menciptakan masa depan sektor budaya yang anti-rasis, representatif, dan kesetaraan.

Saifuddin (2017) mengkaji mengenai multikultural Indonesia saat ini yang berada di era evolusi atau perubahan yang cukup cepat. Multikulturalisme sebagai suatu hal integrasi budaya yang baik bagi Indonesia, sebagai negara yang memiliki budaya yang sangat beragam. Tetapi kekuasaan politik, kekuasaan bidang ekonomi, dan kekuasaan praktis, yang diistilahkan lima huruf yang menyebabkan luka yakni "power". Power sebagai hal yang merusak kesatuan budaya yang menimbulkan konflik sosial intra-suku atau antar-suku, dan intra-agama atau antar-agama di Indonesia, khususnya semenjak penerapan otonomi daerah dan kebijakan penyebaran atau desentralisasi kekuasaan. Temuan pada kajian yakni dampak sosial-budaya dari perubahan yang sangat cepat pada lingkup cakupan lokal, nasional, dan global telah mampu diatasi di Indonesia. Tetapi undang-undang nasional dan peraturan setiap daerah terkait kebudayaan tidak berkembang secepat perubahan pada peningkatan keberagaman (*plurality*) didalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Kesadaran lokal-etnis di Indonesia masih cukup baik, bahkan semakin menjadi lebih baik pada beberapa daerah. Penegakan hukum yang berlaku nasional yang pada kondisi yang tidak pasti, kondisi konflik akibat perlawanan yang semakin rentan terjadi yang mengancam nilai multikultural dan menempatkan posisi yang rawan terpecahkan.

Nurman, Yusriadi, & Hamim (2022) melakukan kajian mengenai perkembangan pendidikan keberagaman (*pluralitas education*) di Indonesia. Penelitian ini menjawab gap riset terkait adanya kekhawatiran masyarakat terhadap ancaman multikultural masyarakat Indonesia. Temuan penelitian tersebut yakni siswa minoritas diberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan dan pembelajaran di tiga sekolah dasar Provinsi Riau, hal ini berkaitan dengan kebijakan kesetaraan pada pendidikan, slogan "pendidikan untuk semua". Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi berupaya untuk merumuskan kebijakan pada keberagaman budaya siswa. Kurikulum merancang referensi multikultural, melalui buku teks siswa didorong untuk mampu beradaptasi pada lingkungan yang multikultur, berbagai sekolah telah dirancang untuk melibatkan berbagai bahasa (multibahasa), sehingga menjadi program yang dapat melahirkan siswa anti-rasis dan menerima pluralitas. Kurikulum tetap melestarikan kebudayaan Indonesia yang diidentifikasi, sehingga budaya Indonesia yang beragam dapat menciptakan sesuatu hal yang positif. Penelitian tersebut sebagai salah satu contoh upaya untuk menciptakan pluralitas yang berdampak positif, dan menghindari adanya kesenjangan yang berdampak konflik dan hal negatif lainnya.

Ketimpangan Pendidikan

Harahap & Rahmadana (2020) memberikan berbagai informasi terkait dengan ketimpangan pendidikan (*education inequality*) melalui analisis determinan. Adapun tujuan penelitian tersebut yakni melakukan analisis pengaruh antara ketimpangan ekonomi dan ketimpangan Pendidikan, tahun 2016-2018. Pendidikan sebagai acuan dasar yang harus dipenuhi untuk mencapai tingkat kesejahteraan pada setiap manusia. Pemerataan pendidikan harus dilakukan di setiap wilayah dengan tidak memperhatikan berbagai suku, agama, ras, antar-golongan, gender, dan latar belakang sosial-ekonomi. Hal tersebut diperlukan sebagai representasi dari urgensi dan peran pendidikan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan. Sebelum megupayakan untuk meningkatkan pemerataan pendidikan, harus diketahui berbagai faktor yang dapat mempengaruhi ketimpangan pendidikan sebagai hal yang harus dipertimbangkan. Beberapa faktor tersebut diantaranya ketimpangan ekonomi yakni kemiskinan, kesejahteraan, dan kesenjangan pendapatan. Adapun temuan didalam penelitian tersebut diantaranya, ditemukan dampak positif pada ketimpangan ekonomi yang meliputi pendapatan, kemiskinan, dan kesenjangan gender memiliki pengaruh signifikan pada ketimpangan pendidikan. Sedangkan pada ketimpangan ekonomi berdampak negative terhadap ketimpangan pendidikan di Indonesia.

Wirandana & Khoirunurrofik (2022) melakukan kajian mengenai ketimpangan pendidikan yang diupayakan untuk menurunkan tingkat kesenjangan melalui transfer keuangan yang dilakukan antar-pemerintah, sehingga dapat diketahui efektif atau tidak efektif untuk diterapkan pada upaya mengurangi kesenjangan pendidikan di Indonesia. Kajian terkait transfer keuangan (fiskal) antar-pemerintah, diantaranya terkait Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan dana Bantuan Operasional Sekolah (Dana BOS), berbagai fiskal tersebut berpengaruh terhadap Koefisien Gini (tingkat disparitas) pendidikan. Adapun temuan penelitian tersebut, yakni pemanfaatan yang kurang efektif pada pelaksanaan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) justru dapat meningkatkan ketimpangan pendidikan. Akan tetapi pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat digunakan untuk operasional sekolah dan pendidikan gratis bagi masyarakat yang membutuhkan, sehingga dapat mengurangi ketimpangan pendidikan. Masukan dan saran pada penelitian ini terkait urgensi meningkatkan belanja pemerintah daerah pada bidang pendidikan, bertujuan untuk peningkatan kuantitas dan kualitas

pendidikan di Indonesia. Berbagai perbaikan didalam pengelolaan tenaga pengajar, institusi sekolah, manajemen anggaran, dan evaluasi menyeluruh yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk mengurangi ketimpangan pendidikan Indonesia.

Idzalika & Bue (2020) memaparkan peluang pendidikan di Indonesia terkait konsistensi faktor ketimpangan. Ketimpangan pendidikan tidak seluruhnya bersifat seimbang atau adil. Adapun temuan pada penelitian tersebut yakni melakukan pendefinisian indeks beban keadaan individu, indeks tersebut melakukan pengukuran pengaruh akumulasi dari berbagai faktor diluar individu. Kemampuan pengendalian individu berpengaruh terhadap prestasi pendidikan individu jangka pendek dan jangka panjang. Saran dan masukan diberikan berkaitan dengan dampak prestasi dapat bertahan seiring waktu. Krisis keuangan tahun 1997 di Asia terutama pada pelajar berdampak pada pendidikan. Efektivitas kebijakan pendidikan pada kesetaraan secara akurat dinilai belum efektif. Peneliti tersebut tidak menemukan berbagai bukti yang berkaitan dengan besaran pengaruh pengeluaran keuangan untuk pendidikan terhadap ketimpangan kesempatan menempuh pendidikan. Muttaqin (2018) melakukan pengkajian berkaitan dengan faktor penentu didalam ketimpangan akses dan ketimpangan kualitas pendidikan di Indonesia. Pemerintah Indonesia terus mengupayakan peningkatan pendidikan pada setiap masyarakat Indonesia. Tetapi berbagai capaian pada peningkatan bidang pendidikan masih belum secara keseluruhan tercapai, sehingga menciptakan keberlanjutan pada kesenjangan pendidikan. Ketimpangan pendidikan di Indonesia memiliki arti penting pada berbagai keterkaitan individu, sosial, politik, ekonomi, dan infrastruktur dari cakupan sempit sampai pada cakupan yang lebih luas. Keterkaitan pada desentralisasi, durasi waktu sekolah mengalami peningkatan kecil, namun kemajuan berkurang setelah dilakukan desentralisasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemangku kebijakan (pemerintah) diperlukan untuk menyadari bahwa satu ukuran untuk seluruh kebijakan akan sulit diterapkan pada konteks yang beragam. Diperlukan kehati-hatian didalam mempertimbangkan berbagai kebijakan agar dapat berjalan optimal. Zapfe & Gross (2021) mengkaji mengenai hubungan karakteristik pada sistem pendidikan yang membentuk kesenjangan pendidikan. Adapun faktor penentu utama pada kesenjangan pendidikan yaitu karakteristik sistem pendidikan. Adapun temuan penelitian didapatkan, rendahnya kesenjangan gender dikaitkan dengan standarisasi. Statifikasi antar instansi sekolah hingga ketimpangan sosial-ekonomi tertinggi berkaitan dengan stratifikasi dan ketimpangan etnis. Penelitian yang ditinjau pada kajian ini tidak memiliki hubungan antara sistem pendidikan makro dan kesenjangan pada sistem pendidikan mikro. Mengupayakan untuk mengurangi kesenjangan pendidikan memiliki manfaat pada seluruh siswa termasuk siswa yang kurang beruntung pada setiap system pendidikan dan siswa yang kurang beruntung pada Masyarakat, ketimpangan pendidikan dikaitkan dengan ketimpangan pendapatan, yang keduanya akan menghasilkan ketimpangan harapan hidup, rendahnya kepercayaan sosial, dan tingkat kejahatan yang semakin meningkat. Pendidikan tidak menghasilkan penjahat dan masyarakat acuh disebabkan ketimpangan pada pendidikan itu sendiri, sehingga evaluasi dan perbaikan dilakukan secara mendasar, menyeluruh, hingga berkelanjutan.

Ketimpangan Politik

Tambunan (2022) mengkaji ancaman Indonesia terhadap korupsi dan legitimasi politik. Telah dikaji secara luas pada konteks Indonesia, adanya suatu hubungan antara kesenjangan, kemiskinan, distribusi sumberdaya, dan pembangunan ekonomi dengan kejadian korupsi yang parah pada perpolitikan. Belum adanya kajian terkait dampak korupsi terhadap legitimasi politik. Penelitian tersebut dicantumkan bertujuan untuk menelaah kasus korupsi dan legitimasi politik Indonesia sebagai bentuk representasi dari ketimpangan politik. Adapun temuan didalam penelitian ini yakni berdasar pada data kuantitatif didapatkan signifikansi didalam legitimasi politik, hal ini digambarkan bahwa korupsi dapat mengikis kepercayaan masyarakat berkaitan dengan demokrasi, supremasi hukum, dan institusi politik. korupsi dapat melemahkan supremasi hukum, melemahkan demokrasi, dan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik.

López & Dubrow (2020) mengkaji mengenai politik dan setiap hal yang berkaitan dengan kesenjangan politik. Kesetaraan politik sebagai landasan demokrasi yang normatif. Kesenjangan politik meliputi setiap dominasi politik pada kelompok elite terhadap masyarakat luas, serta pada kelompok sosial dan kelompok ekonomi tertentu dilakukan pengucilan secara langsung, termasuk juga pengaruh dominasi dari kelompok tertentu dan setiap keputusan yang penting. Adapun temuan didalam penelitian tersebut yakni kesenjangan politik yang masih terjadi sebagai titik lemah pada landasan demokrasi. Terdapat dua mekanisme penting pada kesenjangan politik yakni koordinasi elite politik dan diskoordinasi masal, keduanya saling berelevansi. Koordinasi elite politik berkaitan dengan ketidakmerataan elite politik, dimana partisipasi politik hanya didapatkan oleh elite yang membiarkan berbagai kesenjangan terjadi di sistem politik. Adapun berbagai diskoordinasi masal yang disebabkan poordinasi elite politik yakni berkaitan dengan permasalahan penghambatan koordinasi kolektif untuk kepentingan bersama.

Warburton, Muhtadi, Aspinall, & Fossati (2021) melakukan pengkajian mengenai ketidakstaraan anggota legislasi di Indonesia. Secara umum yang terjadi diseluruh dunia, anggota badan legislasi mayoritas ditempati oleh politisi yang memiliki kelas ekonomi yang tinggi dan memiliki pendidikan yang tinggi jika dibandingkan dengan konstitusinya. Adapun yang terjadi pada Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi yang berkembang terbesar ketiga didunia ditemukan kekayaan dan politik menimbulkan kesenjangan klientelis. Politisi cenderung memiliki latar belakang profesionalitas, tingkat pendidikan, dan pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara politisi dengan masyarakat pemilih secara substansial semakin melebar, berkaitan dengan permasalahan redistribusi ekonomi. Hal ini merupakan salah satu dari kesenjangan politik di Indonesia. Azwar & Subekan (2022) melakukan pengkajian terkait dengan peran demokrasi dalam memberantas permasalahan korupsi di Indonesia. Kajian juga difokuskan pada analisis demokrasi jangka panjang dan jangka pendek terhadap permasalahan korupsi. Adapun temuan penelitian tersebut yakni demokrasi memiliki pengaruh jangka panjang yang signifikan terhadap tingkat korupsi. Indeks korupsi (*corruption index*) dihasilkan dari sistem demokrasi yang dikaitkan dengan stabilitas politik. Berdasarkan data dan temuan penelitian bahwa demokrasi tidak dapat mengurangi permasalahan korupsi di Indonesia, hasil regresi bernilai negatif. Tetapi pada penelitian lainnya, menyatakan bahwa demokrasi mampu mengurangi korupsi di Indonesia. Sedangkan jika berdasarkan pada sudut pandang kebijakan, strategi untuk mengurangi masalah korupsi dilakukan salah satunya dengan melakukan pengembangan beberapa lembaga demokrasi. Demokrasi electoral saja tidak cukup untuk mengurangi korupsi, dibutuhkan lembaga demokrasi yang aktif dan sehat. Pentingnya penelitian ini disematkan didalam pemaparan pada ketimpangan politik disebabkan kasus korupsi telah membudaya, dan ini merupakan sebuah kesenjangan pada bidang politik di Indonesia.

Mraz (2023) melakukan pengkajian mengenai kesetaraan politik sebagai pemerataan yang dapat mencegah ketimpangan politik. Penelitian pada kesetaraan politik untuk mengatasi pandangan pada kesetaraan politik yang berkaitan dengan pemerataan kekuasaan melalui pendekatan yang baru dan pluralis. Berbagai kelemahan terkait implikasinya terhadap tindakan yang afirmatif representasi politik, domain politik, dan situasi minoritas permanen. Kemerataan distribusi politik diperlukan untuk membentuk kesetaraan politik. Adapun temuan penelitian tersebut, yakni kesetaraan politik sebagai cara untuk menyimpulkan bahwa kesetaraan kekuasaan tidak memiliki signifikansi independen terhadap kesetaraan politik. Hal yang pluralis menunjukkan bahwa independensi diperlukan untuk kesetaraan politik, tidak hanya memerlukan persyaratan berdasarkan status.

Ketimpangan Multisektor di Indonesia

Berbagai artikel yang telah dipaparkan didalam bagian hasil dan pembahasan terkait ketimpangan yang terjadi dibeberapa sektor seperti ketimpangan sosial, ketimpangan ekonomi, ketimpangan budaya, ketimpangan politik, dan ketimpangan pendidikan yang dipaparkan pada penelitian ini yakni dilakukan generalisasi atau induktif, sehingga berbagai ketimpangan khusus tersebut sebagai sebuah ketimpangan yang terjadi pada berbagai macam sektor yang berbeda-beda atau disebut juga ketimpangan multisektor di Indonesia. Generalisasi dilakukan agar tampak secara umum terkait sektor mana saja yang terjadi ketimpangan, bagaimana bentuk ketimpangan disetiap sektor, sektor mana yang banyak dilakukan penelitian, dan sebagainya. Kajian ketimpangan multisektor dapat mempermudah pengelompokan dalam pemecahan masalah ketimpangan di beberapa sektor sehingga dapat ditentukan berdasarkan pada skala prioritas. Adapun beberapa artikel yang terkait dengan ketimpangan multisektor di Indonesia dapat lebih rinci divisualisasikan dan dipaparkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Pemetaan Ketimpangan Multisektor di Indonesia

No.	Ketimpangan	Penulis
1	Ketimpangan sosial	(Attamimi, Kinseng, & Agusta, 2018); (Camarero & Olivia, 2019); (Elenbaas, Rizzo, & Killen, 2022);(Hernovianty, Pratiwi, & Adventia, 2021).
2	Ketimpangan ekonomi	(Hill, 2021); (Itskovich & Factor, 2023); (Maurilla, Suriani, & Nasir, 2022); (Mdingi & Ho, 2021); (Sulistyaningrum & Tjahjadi, 2022).
3	Ketimpangan budaya	(Ali & Byrne, 2023); (Saifuddin, 2017); (Supraptiningsih, Jubba, Hariyanto, & Rahmawati, 2023); (Nurman, Yusriadi, & Hamim, 2022).
4	Ketimpangan pendidikan	(Harahap & Rahmadana, 2020); (Idzalika & Bue, 2020); (Muttaqin, 2018); (Wirandana & Khoirunurrofik, 2022); (Zapfe & Gross, 2021).
5	Ketimpangan politik	(Azwar & Subekan, 2022); (López & Dubrow, 2020); (Mraz, 2023); (Tambunan, 2022); (Warburton, Muhtadi, Aspinall, & Fossati, 2021).
6	Keragaman, ketimpangan, dan konflik	(An & Lee, 2022); (Arbatli, Ashraf, Galor, & Klemp, 2020); (Leeuwen & Foldvari, 2016); (Liu, Zhu, & Wang, 2023); (Ramos, Hewstone, Barreto, & Branscombe, 2016); (Servaes, Choudhury, & Parikh, 2022).

Ketimpangan multisektor terjadi pada negara Indonesia karena memiliki keanekaragaman entitas sehingga menimbulkan berbagaimacam ketimpangan. Keberagaman tersebut dapat menjadi sebuah potensi keunggulan Indonesia sebagai negara majemuk, atau justru menjadi ancaman yang melemahkan negara. Ada sektor yang unggul, diprioritaskan, dan memiliki keunggulan, sedangkan sisi sektor lain jauh berbeda dan banyak kelemahan, sehingga perbedaan keduanya sangat signifikan menyebabkan ketimpangan. Sektor di Indonesia yang terdapat kompleksitas dan beragam seperti ekonomi dan sosial budaya sangat rentan terhadap kesenjangan. Semboyan, dasar negara, dan empat pilar kebangsaan yang dilaksanakan dengan baik akan dapat mengurangi setiap ketimpangan dan kesenjangan yang terjadi akibat keberagaman. Contoh kecilnya pada Pancasila termuat nilai-nilai intrinsik yang solutif dalam setiap ketimpangan. Semestinya hal ini yang menjadi perhatian pemangku kepentingan seperti kementerian atau dinas tertentu untuk membenahi ketimpangan di setiap bidangnya masing-masing melalui koordinasi yang optimal.

Publikasi ilmiah pada jurnal terkait dengan kajian ketimpangan sosial ekonomi banyak dilakukan oleh peneliti di Indonesia, karena banyaknya fenomena kajian yang harus diteliti. Kajian yang baru dilakukan pada ketimpangan politik yang dicetuskan didalam kongres tujuh tahun yang lalu, sehingga publikasi ilmiah masih terbatas namun beberapa telah dipublikasikan dengan kata kunci selain ketimpangan politik. Ketimpangan budaya lebih banyak dikaji didalam kajian kesenjangan budaya di suatu tempat, culture lag, dan gegar budaya. Bidang kajian peneliti adalah pendidikan, bagian ini juga banyak sekali permasalahan ketimpangan khususnya pada aksesibilitas.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Keanekaragaman setiap entitas di Indonesia sebagai sebuah potensi kelebihan dan keunikan yang harus terus dilestarikan, agar Indonesia tetap dijadikan sebagai objek kajian penelitian keragaman oleh peneliti dunia. Hal tersebut merupakan kekayaan bangsa yang tidak ternilai oleh apapun, sehingga tugas warga negara adalah menjaganya. Namun adanya keanekaragaman akan juga terjadi berbagai perbedaan yang dapat berpotensi menjadi sebuah ketimpangan. Ketimpangan yang berkelanjutan akan dapat memunculkan suatu konflik yang meluas di beberapa sektor, sehingga banyak menyebutkan bahwa telah terjadi ketimpangan multisektor. Ketimpangan multisektor diantaranya yaitu ketimpangan ekonomi, ketimpangan sosial, ketimpangan budaya, ketimpangan politik, dan ketimpangan pendidikan yang terjadi di Indonesia. Ketimpangan-ketimpangan tersebut muncul sebagai rendahnya koordinasi antar pemangku kepentingan, serta belum secara optimal menerapkan beberapa nilai intrinsik dari empat pilar kebangsaan yang didalamnya memuat berbagaimacam solusi pemecahan masalah. Saran pada penelitian ini ditujukan kepada pemangku kepentingan pada setiap bidang yakni bidang ekonomi, bidang social, bidang kebudayaan, bidang hukum dan politik, serta bidang lainnya yang berhubungan dengan multisektor di Indonesia. Saran penelitian ini pada setiap pemangku kepentingan agar dapat dikaji dan ditindaklanjuti terkait dengan setiap permasalahan agar segera dilakukan pemecahan masalahnya. Saran selanjutnya ditujukan pada peneliti selanjutnya, agar mengkaji dan mengembagkan keberagaman Indonesia sebagai sebuah potensi dengan menggunakan metode penelitian yang lebih kompleks. Diharapkan adanya keanekaragaman di Indonesia sebagai keunggulan dan keunikan Indonesia yang dapat menjadi potensi kekuatan dunia, bukan sebagai permasalahan yang berkelanjutan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkarim, A., Komalasari, K., Saripudin, D., Ratmaningsih, N., & Anggraini, D. N. (2020). Development of a Unity in Diversity-based Pancasila Education Text Book for Indonesian Universities. *International Journal of Instruction*, 371-386. <https://doi.org/10.29333/iji.2020.13125a>.
- Ali, R., & Byrne, B. (2023). The Trouble with Diversity: The Cultural Sector and Ethnic Inequality. *Cultural Sociology*, 493-513. <https://doi.org/10.1177/17499755221114550>.
- An, S., & Lee, S.-Y. (2022). The Impact of Gender Diversity and Disparity on Organizational Performance: Evidence from Korean Local Government-Owned Enterprises. *Review of Public Personnel Administration*, 395-415. <https://doi.org/10.1177/0734371X21990718>.
- Arbatli, C. E., Ashraf, Q. H., Galor, O., & Klemp, M. (2020). Diversity and Conflict. *Econometrica*, 727-797. <https://doi.org/10.3982/ECTA13734>.
- Attamimi, G. R., Kinseng, R. A., & Agusta, I. (2018). Kelas Ketimpangan Struktural Masyarakat Nelayan di Kota Ambon. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 228-236. <http://dx.doi.org/10.22500/sodality.v6i3.22607>.
- Azwar, & Subekan, A. (2022). Does Democracy Reduce Corruption in Indonesia? *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 195-208. <https://doi.org/10.22146/jsp.56886>.
- Bui, T. K., & Erreygers, G. (2020). Multidimensional Inequality in Vietnam, 2002-2012. *Economies*, 1-31. <http://dx.doi.org/10.3390/economies8020029>.

- Camarero, L., & Olivia, J. (2019). Thinking in Rural Gap: Mobility and Social Inequalities. *Palgrave Communications*, 1-7. <https://doi.org/10.1057/s41599-019-0306-x>.
- Elenbaas, L., Rizzo, M. T., & Killen, M. (2022). A Developmental Science Perspective on Social Inequality. *Curriculum Direct Psychology Science*, 610-616. <https://doi.org/10.1177%2F0963721420964147>.
- Harahap, E. S., & Rahmadana, I. M. (2020). Determinant Analysis of Education Inequalities in Indonesia. *Budapest International Research and Critics Institute Journal*, 1067-1082. <http://dx.doi.org/10.33258/birci.v3i2.937>.
- Hernovianty, F. R., Pratiwi, N. N., & Adventia, D. (2021). Analisis Ketimpangan Sosial Wilayah di Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif*, 212-225. <https://doi.org/10.20961/region.v17i1.50815>.
- Hill, H. (2021). What's happened to Poverty and Inequality in Indonesia over Half a Century? *Asian Development Review*, 68-97. https://doi.org/10.1162/adev_a_00158.
- Idzalika, R., & Bue, M. C. (2020). Educational Opportunities in Indonesia: Are Factors Outside Individual Responsibility Persistent Over Time?. *The Journal of Development Studies*, 1-16. <https://doi.org/10.1080/00220388.2019.1690133>.
- Itskovich, E., & Factor, R. (2023). Economic Inequality and Crime: The Role of Social Resistance. *Journal of Criminal Justice*, 1-16. <https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2023.102065>.
- Jayadi, K., Abduh, A., & Basri, M. (2022). A meta-analysis of multicultural education paradigm in Indonesia. *Heliyon*, 1-5. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e08828>.
- Leeuwen, B. v., & Foldvari, P. (2016). The Development of Inequality and Poverty in Indonesia, 1932-2008. *Bulletin of Indonesia Economic Studies*, 379-402. <https://doi.org/10.1080/00074918.2016.1184226>.
- Lestari, G. (2015). Bhinneka Tunggal Ika: Khasanah Multikultural Indonesia di Tengah Kehidupan SARA. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 31-37. <http://dx.doi.org/10.17977/jppkn.v28i1.5437>.
- Liu, J., Zhu, Y., & Wang, H. (2023). Managing the Negative Impact of Workforce Diversity: The Important Roles of Inclusive HRM and Employee Learning-Oriented Behaviors. *Front Psychology*, 1-15. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1117690>.
- López, M., & Dubrow, J. K. (2020). Politics and Inequality in Comparative Perspective: A Research Agenda. *American Behavioral Scientist*, 1199-1210. <https://doi.org/10.1177/0002764220941234>.
- Maurilla, A., Suriani, & Nasir, M. (2022). Do Poverty and Economic Growth Matter for Income Inequality Reduction in Yogyakarta Province? *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 308-322. <https://doi.org/10.18196/jesp.v23i2.15859>.
- Mdingi, K., & Ho, S.-Y. (2021). Literature Review on Income Inequality and Economic Growth. *MethodsX*, 1-12. <https://doi.org/10.1016/j.mex.2021.101402>.
- Mraz, A. (2023). Does Political Equality Require Equal Power: A Pluralist Account. *Ethical Theory and Moral Practice*, 1-16. <https://doi.org/10.1007/s10677-023-10425-w>.
- Muttaqin, T. (2018). Determinants of Unequal Access to and Quality of Education in Indonesia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 1-23. <https://doi.org/10.36574/jpp.v2i1.27>.
- Niranjan, R. (2020). Spatial inequality in human development in India- A case study of Karnataka. *Sustainable Futures*, 1-10. <https://doi.org/10.1016/j.sfr.2020.100024>.
- Nurman, Yusriadi, & Hamim, S. (2022). Development of Pluralism Education in Indonesia: A Qualitative Study. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 106-120. <https://doi.org/10.29333/ejecs/1207>.
- Ramos, M. R., Hewstone, M., Barreto, M., & Branscombe, N. R. (2016). The Opportunities and Challenges of Diversity: Explaining its Impact on Individuals and Groups. *European Journal of Social Psychology*, 1-45. <http://dx.doi.org/10.1002/ejsp.2261>.
- Saifuddin, A. F. (2017). Five Letters That Hurt: The Multicultural Indonesia in Current Faster Change Era. *Asia Pasific Journal of Advanced Business and Social Studies*, 168-175. <https://doi.org/10.25275/apjabssv3i2ss1>.
- Servaes, S., Choudhury, P., & Parikh, A. K. (2022). What is diversity? *Pediatric Radiology*, 1708-1710. <https://doi.org/10.1007/s00247-022-05356-0>.
- Snyder, H. (2019). Literature Review as a Research Methodology: An Overview and Guidelines. *Journal of Business Research*, 333-339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>.
- Sugiharti, L., Purwono, R., Esquivias, M. A., & Rohmawati, H. (2023). The Nexus between Crime Rates, Poverty, and Income Inequality: A Case Study of Indonesia. *Economies*, 1-15. <https://doi.org/10.3390/economies11020062>.

- Sulistyaningrum, E., & Tjahjadi, A. M. (2022). Income Inequality in Indonesia: Which Aspects Cause the Most? *Journal of Indonesian Economy and Business*, 229-253. <https://doi.org/10.22146/jieb.v37i3.2015>.
- Supraptiningsih, U., Jubba, H., Hariyanto, E., & Rahmawati, T. (2023). Inequality as a Cultural Construction: Women's Access to Land Rights in Madurase Society. *Cogent Social Sciences*, 1-11. <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2194733>.
- Tambunan, D. (2022). Indonesia Under Threat: The Danger of Corruption to Political Legitimacy. *Asian Journal of Comparative Politics*, 1-15. <https://doi.org/10.1177/20578911221124965>.
- Warburton, E., Muhtadi, B., Aspinall, E., & Fossati, D. (2021). When Does Class Matter? Unequal Representation in Indonesia Legislatures. *Third World Quarterly*, 1253-1276. <https://doi.org/10.1080/01436597.2021.1882297>.
- Wirandana, P. A., & Khoirunurrofik. (2022). Education Inequality in Indonesia: are Intergovernmental Fiscal Transfers Effective in Reducing the Gap? *Educational Studies*, 1-14. <https://doi.org/10.1080/03055698.2022.2103647>.
- Zapfe, L., & Gross, C. (2021). How do characteristics of educational systems shape educational inequalities? Results from a systematic review. *International Journal of Educational Research*, 1-10. <https://doi.org/10.1016/j.ijer.2021.101837>.
- Zuldin, M. (2019). Ketimpangan Sebagai Penyebab Konflik: Kajian Atas Teori Sosial Kontemporer. *Jurnal Pembangunan Sosial*, 157-183. <http://dx.doi.org/10.15575/jt.v2i1.4050>.